

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemberdayaan merupakan suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri (Saprijal, 2015). Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat didefinisikan sebagai penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Effendi, 2009).

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah upaya pemerintah sebagai bentuk meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs) melaksanakan pemberdayaan perempuan menjadi latar belakang pemerintah di Indonesia dalam menyelenggarakan Program Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang bertujuan untuk mendorong perempuan sebagai masyarakat yang partisipatif dan sejahtera serta mendukung terciptanya kesetaraan gender. Pemberdayaan muncul karena adanya kegagalan dan harapan (Friedmann, 1992). Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi terdahulu dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya model-model pembangunan alternatif yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kedudukan yang sama secara hukum yang telah ditetapkan di Indonesia. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih dijumpai kesulitan-kesulitan kaum perempuan dalam merealisasikan hak-haknya.

Masih banyak perempuan yang mengalami keterbatasan dalam melakukan kontrol maupun menerima manfaat pembangunan di segala bidang kehidupan. Perbedaan peran sosial perempuan dan laki-laki berakibat pada perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitosmitos (Kemenpppa, 2022)

Marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat lemah. Hal ini menyebabkan kondisi perempuan makin memprihatinkan. Kombinasi ketiadaan akses pada unsur ekonomi, sosial, dan kuasa yang dihadapi oleh perempuan miskin menyebabkan terjadinya peningkatan. Dengan begitu pemerintah menetapkan kebijakan mengenai kesetaraan Gender, terdapat pada Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pelatihan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi lak-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan”.

Dengan demikian pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terjadi akibat perbedaan jenis kelamin yang dipergunakan di masyarakat, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik cenderung tidak menghasilkan uang, kekuasaan, dan pengaruh (Kemenpppa, 2022). Peran domestik ini diserahkan kepada perempuan, dan apabila ada laki-laki yang berperan dalam ranah domestik maka hanya bersifat membantu saja. Peran publik merupakan peran yang dilakukan oleh laki-laki dan dapat menghasilkan uang, kekuasaan dan pengaruh. Menurut Munir (2010), wilayah publik terdiri dari pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan dan pelatihan media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama, dan kultur di hampir semua masyarakat di dunia ini didominasi oleh laki-laki. Pembagian kerja tersebut mengakibatkan

ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan ketidakadilan gender yang dapat merugikan perempuan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kemenppa, nilai IPG Indonesia pada tahun 2021 masih rendah dengan perolehan nilai 68,52 (Kemenppa, 2022). Sementara IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pada tahun 2021 adalah 73,29. Angka IPG yang lebih rendah daripada angka IPM menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan persamaan dan kesetaraan gender belum sepenuhnya mampu diwujudkan. Sebagian besar perempuan masih mengalami keterbatasan mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan yang tinggi, kesempatan bidang ekonomi, dan terbatasnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik dan dalam pengambilan keputusan. Rendahnya SDM perempuan akan mengakibatkan perempuan semakin tertinggal dan terbelakang sehingga mengalami ketidakadilan gender.

Indeks Pembangunan Gender merupakan indikasi dari peran gender dalam pembangunan sosial kemasyarakatan, di mana keikutsertaan gender dalam pembangunan sebagai gambaran pendugaan di mana semakin banyaknya keterlibatan gender dalam pembangunan memberikan nilai positif bagi subyek gender tersebut secara indikatif (BPPM, 2020).

Berdasarkan data dari BPS (2022), nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Ciamis pada tahun 2022 mencapai 71,45. Sementara nilai IPG (Indeks Pembangunan Gender) Kabuapten Ciamis pada tahun 2022 mencapai 87,04. Adanya selisih antara IPM dan IPG tersebut menunjukkan bahwa disparitas gender dalam pembangunan manusia masih terjadi di Kabupaten Ciamis.

Ketimpangan gender masih terjadi di Kabupaten Ciamis dalam berbagai bidang kehidupan. Beberapa di antaranya adalah dalam bidang ketenagakerjaan yang terlihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki masih lebih tinggi daripada perempuan.

Perempuan sebagai ibu rumah tangga memiliki resiko berkurangnya kegiatan produktif di sektor publik, sehingga potensi maupun minatnya kurang dapat tersalurkan. Peran perempuan dalam masyarakat juga perlu ditingkatkan agar perempuan dapat menjadi teladan yang baik di masyarakat melalui sumbangan pemikiran maupun berbagai

kegiatan positif dalam menghadapi permasalahan di lingkungannya. Peran domestik yang sangat menonjol bagi perempuan ibu rumah tangga perlu dituntut peran aktifnya, sehingga melalui pengetahuan dan pengalamannya ia dapat menjadi perempuan yang mandiri dan bertanggung jawab baik kepada keluarga maupun masyarakatnya.

Di Desa Buniseuri masih ada perempuan dengan usia produktif yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah yaitu keluarga miskin, keluarga pra sejahtera, dan keluarga sejahtera tahap I. Perempuan dengan kondisi tersebut, membutuhkan upaya pemberdayaan.

Upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Desa Buniseuri adalah melalui Program Terpadu P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera). Salah satu program yang diselenggarakan oleh kelompok P2WKSS di Desa Buniseuri untuk meningkatkan peranan wanita adalah pendidikan dan pelatihan sadar gender. Pendidikan dan pelatihan sadar gender yang diselenggarakan ini bertujuan meningkatkan pemahaman perempuan akan hak-haknya sehingga diharapkan produktivitasnya juga bertambah dan mencegah adanya ketidakadilan gender.

Ruslan. (2014) menyatakan bahwa :

“Keterbelakangan kaum perempuan di Indonesia bisa dilihat dari kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan yang menjadi penghalang bagi kaum perempuan sehingga dengan adanya pemberdayaan perempuan dapat mengatasi pemerataan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki”.

Permasalahan belum optimalnya pemberdayaan perempuan disebabkan oleh pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh kaum perempuan sehingga kaum perempuan belum memiliki kecakapan personal, sosial, intelektual maupun vocational. Hal ini sejalan dengan pendapat Mangkunegara (2015), yang menyatakan bahwa : Pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup (*life skills*) adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vocational untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan dan pelatihan perempuan merupakan sebuah langkah untuk penyadaran bagi kaum perempuan. Upaya penyadaran ditempuh dengan harapan

membantu perempuan sendiri menemukan jati diri dan perannya di tengah masyarakat yang terus berubah (Paulus, 2002). Melalui pendidikan dan pelatihan, perempuan akan lebih cerdas dan bijak dalam menghadapi permasalahan hidup. Perempuan yang berpendidikan dan pelatihan dan memiliki wawasan yang luas dapat melahirkan dan mendidik generasi berikutnya agar lebih baik.

Indonesia telah mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan pemberdayaan perempuan, sebagai langkah untuk mewujudkan keadilan gender. Pendidikan dan pelatihan pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam ranah Pendidikan dan pelatihan Luar Sekolah. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa “Pendidikan dan pelatihan nonformal meliputi pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup, pendidikan dan pelatihan anak usia dini, pendidikan dan pelatihan kepemudaan, pendidikan dan pelatihan pemberdayaan perempuan, pendidikan dan pelatihan keaksaraan, pendidikan dan pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan dan pelatihan kesetaraan, serta pendidikan dan pelatihan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan perempuan dinilai masih belum optimal karena masih banyak perempuan yang mengalami tindakan diskriminatif.

Tingkat pendidikan dan pelatihan bagi perempuan di Desa Buniseuri sudah baik, meskipun masih perlu perbaikan. Berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan pelatihan.



Sumber: Desa Buniseuri

Gambar 1.1
Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Buniseuri

Data mengenai pendidikan tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Desa Buniseuri sudah dapat mengakses pendidikan dan pelatihan formal selayaknya kaum laki-laki. Permasalahan perempuan di Desa Buniseuri adalah masih banyaknya perempuan yang berperan di sektor domestik saja.

Dengan demikian masyarakat secara bersama-sama harus mampu untuk menciptakan akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya bagi perempuan agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kegiatan pemberdayaan bagi kaum perempuan di UMKM Idaman Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis hal ini disebabkan kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada kaum perempuan sehingga menyebabkan masih kurangnya kemampuan perempuan dalam memiliki kecakapan personal, sosial, intelektual maupun vokasional.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mengkaji tentang **“Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Pemberdayaan Perempuan di UMKM Idaman Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pendidikan, pelatihan karyawan dan pemberdayaan perempuan pada UMKM Idaman Ciamis?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pemberdayaan perempuan di UMKM Idaman Ciamis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui gambaran pendidikan, pelatihan karyawan dan pemberdayaan perempuan pada UMKM Idaman Ciamis.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pemberdayaan perempuan di UMKM Idaman Ciamis.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai gambaran pengetahuan dan pemberdayaan perempuan pada karyawan UMKM Idaman di Desa Buniseuri, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis atau Peneliti

Dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya.

3) Bagi Akademisi

Hasil penelitian atau kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademis.